

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan berkaitan dengan topik yang serupa beserta persamaan dan perbedaan antara lain:

1. Erlita Risnawati (2012)

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan (Citra, Minat, Keputusan bersama, Tersedianya lapangan kerja bagi lulusan akuntansi) berpengaruh terhadap keputusan calon mahasiswa untuk memilih jurusan akuntansi di STIE Perbanas Surabaya

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan berikut :

Hasil penelitiannya adalah Dari hasil analisis faktor menunjukkan bahwa semua variabel yang berjumlah enam belas berpengaruh terhadap pemilihan jurusan akuntansi di STIE Perbanas. Faktor tersebut terdiri dari empat faktor utama dan tiga faktor temuan baru. Kelima faktor tersebut mendasari pemilihan jurusan akuntansi di STIE Perbanas Surabaya. Empat faktor utama : Faktor Citra , Faktor tersedianya lapangan kerja, Faktor minat dengan tiga variabel, Faktor keputusan bersama, Satu faktor temuan baru adalah Faktor Pelayanan dan fasilitas kampus

Persamaan : Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas analisis faktor dan alat uji nya,

Perbedaan : Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah Analisis Faktor – Faktor Pengambilan Keputusan Mahasiswa Untuk Memilih

Jurusan Akuntansi Di Stie Perbanas Surabaya sedangkan penelitian sekarang membahas Analisis Faktor Yang Membentuk Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi Di Surabaya

2. Wulandari (2011)

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian mengenai penerapan SAK ETAP pada UMKM dengan studi kasus pada kampung batik laweyan Surakarta.

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan berikut :

Hasil penelitiannya adalah (1) UMKM di kampung tersebut mayoritas telah melakukan pencatatan transaksi harian penerimaan/pengeluaran kas, penjualan/pembelian, utang/piutang, serta catatan persediaan. (2) Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan UMKM tersebut hanya untuk pihak intern dan didasarkan pada kebutuhan akan laporan keuangan, bukan kewajiban yang mengikat dengan pihak ekstern yang mengharuskan UMKM melaporkan kondisi keuangannya. (3) Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan yang disyaratkan SAK ETAP belum semua dapat dipenuhi, hanya beberapa yang dapat dipenuhi, karakteristik tersebut antara lain: dapat dipahami, tepat waktu, dapat dibandingkan, relevan, kelengkapan dan keandalan. (4) Mayoritas UMKM belum mengetahui SAK ETAP, sehingga SAK ETAP belum diterapkan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan UMKM di kawasan Kampung Batik Laweyan.

Persamaan : Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan SAK ETAP

Perbedaan : Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian mengenai penerapan SAK ETAP pada UMKM dengan studi kasus pada kampung batik laweyan Surakarta, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Analisis Faktor Yang Membentuk Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi Di Surabaya

3. Adityawan Salam (2010)

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah analisis persepsi akuntan terhadap Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan berikut :

Hasil penelitiannya adalah (1) Persepsi akuntan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yaitu relevan diterapkan pada lingkup Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dilihat dari rata-rata skor dari responden sebesar 3.52. (2) Persepsi akuntan terhadap Standar Akuntansi Keuanagn Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah efektif diterapkan pada lingkup Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dilihat dari rata-rata skor dari responden sebesar 3.805. (3) Tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi akuntan public dengan akuntan manajemen terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Persamaan : Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Perbedaan : Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah analisis persepsi akuntan terhadap Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Analisis Faktor Yang Membentuk Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi Di Surabaya

4.Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari,A.Mongid (2006)

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dimana para peneliti ingin memaparkan Pelayanan Mutu Total (PMT) pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Surabaya. Dalam mengimplementasinnnya PMT umumnya mencapai enam faktor yaitu: komitmen dari manajemen puncak, perbaikan produk,perbaikan proses, kemampuan SDM, tanggapan yang berorientasi pelanggan dan keunggulan ekonomis (Lakhe dan Mohanti, 1995). Semakin tinggi kesadaran manajemen organisasi dalam menerapkan enam faktor ini, menunjukkan semakin kuat implementasi PMT di organisasi.

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan berikut :

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi PMT yang kurang baik (rendah) sebagian besar dilakukan pada KSP dengan klasifikasi C dan belum terakreditasi. Ini artinya bahwa kalau KSP itu terakreditasi dan termasuk dalam klasifikasi A dan B artinya dari aspek PMT pun terimplementasikan dengan baik.

Persamaan : Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menggunakan obyek penelitian yang sama yaitu membahas SDM dan menggunakan koperasi simpan pinjam

Perbedaan : Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas tentang implementasi PMT di koperasi Simpan Pinjam di Kota Surabaya, sedangkan peneliti sekarang membahas tentang Analisis Faktor Yang Membentuk Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi Di Surabaya

5. Grace Tiana Solovida (2003)

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian mengenai “analisis faktor-faktor yang membentuk penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan kecil dan menengah di Jawa Tengah”.

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan berikut :

Hasil penelitiannya adalah (1) Terdapat pengaruh yang positif semua variabel independen yaitu skala usaha, masa memimpin, umur perusahaan, pendidikan, sektor industri, pelatihan akuntansi yang diikuti serta budaya organisasi secara bersama-sama terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi. (2) variabel masa memimpin, pendidikan, umur perusahaan, pelatihan akuntansi yang diikuti serta budaya organisasi berpengaruh positif terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi. (3) Sedangkan variabel skala usaha dan sektor industri berpengaruh negatif terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi.

Persamaan : Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang analisis faktor dan pelatihan.

Perbedaan : Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian mengenai “analisis faktor-faktor yang membentuk penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan kecil dan menengah di Jawa Tengah, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Analisis Faktor Yang Membentuk Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi Di Surabaya.

2.2 Landasan Teori

Beberapa teori yang dapat melandasi atau menggambarkan penelitian ini antara lain :

2.2.1 Teori Yang Mendasari

Teori Gender

Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Secara etimologis kata ‘gender’ berasal dari bahasa Inggris yang berarti ‘jenis kelamin’ (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 265). Kata ‘gender’ bisa diartikan sebagai ‘perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (Victoria Neufeldt (ed.), 1984: 561).

Secara terminologis, ‘gender’ bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Hilary M. Lips, 1993: 4). Definisi lain

tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, 'gender' adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Elaine Showalter (ed.), 1989: 3). Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Nasaruddin Umar, 1999: 34). Lebih tegas lagi disebutkan dalam *Women's Studies Encyclopedia* bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Siti Musdah Mulia, 2004: 4).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Gender berbeda dengan *sex*, meskipun secara etimologis artinya sama sama dengan *sex*, yaitu jenis kelamin (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 517). Secara umum *sex* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek nonbiologis lainnya. Kalau studi *sex* lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas seseorang.

Cukup banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli, terutama kaum feminis, untuk memperbincangkan masalah gender, tetapi dalam kesempatan ini akan dikemukakan salah satu yang dianggap penting dan cukup populer.

Teori Struktural-Fungsional

Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons (Ratna Megawangi, 1999: 56).

Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi sosial pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi sekretaris atau bendahara, dan ada yang menjadi anggota biasa. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat (Ratna Megawangi, 1999: 56).

Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat pra industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu,

lakilaki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh *sex* (jenis kelamin).

Pelatihan

Jain (1999) menyatakan bahwa pelatihan akan menghasilkan peningkatan profesional yang lebih jauh dalam manajemen. Penelitian Holmes dan Nicholls (1988,1989) menunjukkan bahwa pelatihan berhubungan positif terhadap penyediaan informasi akuntansi untuk membuat keputusan dalam perusahaan kecil. Manajemen yang dipakai dalam kursus pelatihan cenderung menghasilkan lebih banyak informasi akuntansi, anggaran dan tambahan dibandingkan dengan mereka yang kurang pelatihan.

Koperasi perlu menetapkan pelatihan yang sesuai bagi para anggotanya, diantaranya pelatihan bagi pengurus, pengawas, manajer, kasir dan petugas simpan pinjam. Jenis pelatihan yang dapat di ikuti antara lain, jenis pelatihan yang ditunjukkan untuk : (1) pengurus (2) pengawas (3) manajer, dimana pelatihan yang diikuti oleh manajer adalah pelatihan tentang kewirausahaan yang bertujuan agar manajer dapat mempunyai wawasan berwirausaha dalam mengembangkan koperasi, studi kelayakan usaha, manajemen pemasaran dan keuangan yang bertujuan agar manajer dapat mengelolakoperasi dengan professional baik untuk

mengelola dana koperasi maupun mengelola produk yang ditawarkan pada para anggota koperasi, kasir (Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari. 2008)

Sumber Daya Manusia (SDM)

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang mempunyai sifat gotong royong. Oleh karena itu agar dalam pengelolaannya berjalan dengan baik koperasi perlu memperhatikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Berkembang tidaknya koperasi sangat ditentukan sekali oleh Sumber Daya yang dimiliki, tidak terkecuali untuk koperasi Simpan Pinjam. Untuk itu maka peranan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam koperasi baik sebagai anggota, pengurus maupun perlu dikelola dengan baik oleh organisasi koperasi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten adalah ketrampilan, pengetahuan, sikap yang baik) maka mudah bagi organisasi khususnya koperasi untuk berkembang dan bersaing dengan koperasi lainnya.

2.2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah sesuai dengan judulnya yaitu dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dalam SAK ETAP paragraf 1.1 (IAI, 2009) mengungkapkan yang dimaksud dengan entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Paragraph 1.2 lebih memperjelas lagi yang termasuk dalam entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan, jika:

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pertanyaan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, etas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pension, reksa dana dan bank investasi.

SAK ETAP berlaku efektif per 1 Januari 2011, seperti yang diungkapkan dalam paragraph 30.1 (IAI, 2009). Namun penerapan dini per 1 Januari 2010 diperbolehkan. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP, kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK ETAP.

Apabila SAK ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK

umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan dapat dilihat dari ketebalan SAK ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab.

Iman dan Tri (2009) mengungkapkan kebijakan akuntansi SAK ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka ketentuan transisi dalam SAK ETAP ini cukup ketat. Pada Bab 29 misalnya disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK ETAP, yakni 1 January 2011, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya. Oleh sebab itu per 1 Januari 2011, perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik harus memilih apakah akan tetap menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK atau beralih menggunakan SAK-ETAP.

Selanjutnya ketentuan transisi juga menjelaskan bahwa entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yang memutuskan menggunakan SAK ETAP pada tahun 2011, namun kemudian mendaftarkan menjadi perusahaan publik di tahun berikutnya. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non-ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK

ETAP ini kembali. Sebaliknya, entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan.

2.2.3 Koperasi

Definisi dan Peran Koperasi

Koperasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris "*Coperation*" yang terdiri dari dua suku kata, yaitu "co" yang berarti bersama dan "*operation*" yang artinya bekerja. Jadi secara keseluruhan koperasi berarti bekerja sama. Menurut pengertian umum, koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang bekerja sama demi kesejahteraan bersama.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Jadi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari

pendirian koperasi tersebut yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota.

Koperasi merupakan organisasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya, seperti BUMN/D atau organisasi pemerintah. Koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Selain itu, dalam fungsi pencarian atau perolehan dana, koperasi berpegang pada prinsip swadaya artinya diupayakan modal berasal dari kemampuan sendiri yang ada dalam koperasi, namun apabila diperlukan dan dipandang mampu koperasi dapat mengambil dana dari luar.

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (Sisa Hasil Usaha) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.

Ukuran Koperasi

Di dalam himpunan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan koperasi menjelaskan bahwa ukuran koperasi dapat dilihat berdasarkan omzet per tahun (volume usaha) yang dimuat dalam laporan perkembangan usaha. Berdasarkan omzetnya ukuran koperasi diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu koperasi besar, koperasi menengah, dan koperasi kecil.

1. Koperasi besar mempunyai omzet (volume usaha) diatas Rp 1 Milyar dalam 1 (satu) tahun.
2. Koperasi menengah mempunyai omzet (volume usaha) antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 Milyar dalam 1 (satu) tahun.
3. Koperasi kecil mempunyai omzet (volume usaha) kurang dari Rp 500 juta dalam 1 (satu) tahun.

Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 16 jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri dari lima jenis, yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi beranggotakan para consume dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi

3. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.

5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

2.2.4 Faktor Yang Membentuk Pemahaman SAK-ETAP

Faktor yang diduga dapat membentuk berhasil tidaknya pemahaman SAK-ETAP antara lain :

A. Gender

Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Secara etimologis kata 'gender' berasal dari bahasa Inggris yang berarti 'jenis kelamin' (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 265). Kata 'gender' bisa diartikan sebagai 'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (Victoria Neufeldt (ed.), 1984: 561).

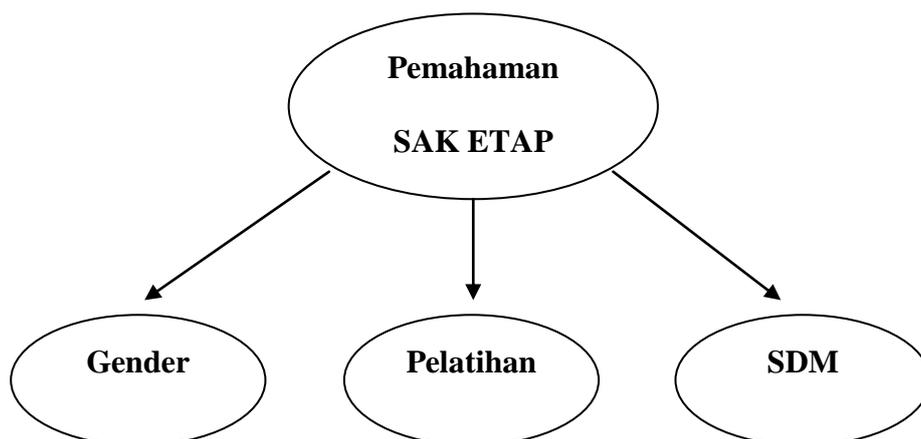
B. Pelatihan

Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi (Mathis, 2002). Maka dari itu, proses pelatihan ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi. Sedangkan Ivancevich (2008) mengemukakan bahwa Pelatihan (*training*) adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kerja organisasi. Pelatihan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya.

C. Sumber Daya Manusia

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang mempunyai sifat gotong royong. Oleh karena itu agar dalam pengelolaannya berjalan dengan baik koperasi perlu memperhatikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Berkembang tidaknya koperasi sangat ditentukan sekali oleh Sumber Daya yang dimiliki, tidak terkecuali untuk koperasi Simpan Pinjam. Untuk itu maka peranan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam koperasi baik sebagai anggota, pengurus maupun perlu dikelola dengan baik oleh organisasi koperasi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten adalah ketrampilan, pengetahuan, sikap yang baik) maka mudah bagi organisasi khususnya koperasi untuk berkembang dan bersaing dengan koperasi lainnya.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran